

BAB IV

ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan. Persoalan dan dimensi pembangunan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia selalu berubah dan makin kompleks. Permasalahan dan tuntutan pembangunan yang dihadapi akan bertambah banyak, sedangkan kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas, sehingga akan menimbulkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dampaknya akan memunculkan isu-isu strategis pembangunan.

4.1.1. Pelayananan Urusan Kewenangan Wajib

a. Pendidikan

1. Belum memadainya penyediaan sarana, prasarana dan SDM pelaksana pendidikan.
2. Kualitas penyelenggaraan pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah belum optimal.
3. Keterjangkauan pelayanan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah masih rendah.
4. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah.
5. Kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan pendidikan masih rendah.

b. Kesehatan

1. Pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi masih kurang. Hal ini dikarenakan sulitnya jangkauan akses pelayanan kesehatan untuk ibu melahirkan, keterlambatan mengambil keputusan oleh pihak keluarga, terbatasnya bidan desa yang tinggal di desa binaannya, pelayanan persalinan oleh bukan tenaga kesehatan.

2. Angka kesakitan pada penyakit menular tertentu masih tinggi dan ada kecenderungan meningkat serta penyakit tidak menular tertentu juga meningkat. Disebabkan oleh masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, pola hidup sehat serta lingkungan yang masih kurang baik.
3. Mutu pelayanan kesehatan baik sarana, prasarana maupun sumber daya kesehatan masih kurang dari segi kuantitas dan kualitas untuk itu perlu ditingkatkan.
4. Gizi buruk pada balita masih banyak ditemukan walaupun jumlahnya relatif kecil.
5. Kesadaran masyarakat dalam penggunaan obat rasional masih kurang . dikarenakan masih rendahnya mendapatkan obat di luar resep dokter.
6. Pelayanan masyarakat miskin belum terlayani secara optimal dan data base makin belum akurat serta terbatasnya biaya pelayanan kesehatan makin di luar jamkesmas.
7. Sistem pemeliharaan kesehatan di masyarakat belum berkembang hal ini Kabupaten Sragen belum memiliki sistem jaminan kesehatan yang terpadu.

C. Pekerjaan Umum

Jalan dan Jembatan

1. Pelayanan jaringan transportasi masih belum memadai, hal ini didasarkan atas kondisi jaringan jalan yang ada, dan masih banyak yang mengalami kerusakan.
2. sistem informasi / data base jalan / jembatan dalam perencanaan pembangunan jalan / jembatan dan pemanfaatan ruang kota belum terintegrasi. Hal ini dapat dilihat dengan belum tersusunnya data base secara terpadu sebagai pendukung dalam perencanaan pembangunan.

Persampahan

1. Volume sampah semakin meningkat akibat bertambahnya jumlah penduduk.
2. Pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum berfungsi maximum.

3. Peningkatan kualitas pengelolaan TPA masih kurang, hal ini dikarenakan pengelolaan sampah yang ada masih banyak menggunakan *system onsite* / olah ditempat.
4. Sarana dan prasarana persampahan di beberapa kecamatan masih kurang.

Sumber Daya Air

1. Belum optimalnya pengelolaan air permukaan yang tertampung, yang bisa dipergunakan untuk kebutuhan air baku maupun air irigasi.
2. Kondisi jaringan irigasi untuk pemenuhan kebutuhan pengairan sawah kurang berfungsi maximum. Hal ini dapat diketahui angka kerusakan jaringan irigasi primer, sekunder maupun tersier yang masih cukup tinggi dan mengakibatkan penurunan fungsi air irigasi.
3. Penyediaan dan pengelolaan air baku belum sesuai harapan, sehingga IPAM belum bisa beroperasi sesuai dengan kapasitas terpasang.
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi air tanah, dikarenakan belum tersedianya peta potensi dan rencana pengembangan air tanah.
5. PDAM masih terbatas dalam mengidentifikasi, memanfaatkan dan mengkonversi sumber daya air yang tersedia.

Air Limbah

1. Meningkatnya volume air limbah cair baik dari industri maupun domestik cukup besar.
2. Sistem sanitasi masih belum terpadu dalam perencanaan induk *system* pengelolaan air limbah.
3. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana sanitasi di wilayah Kabupaten Sragen, dimana dilihat dari sebagian besar masyarakat masih menggunakan teknik pengelolaan air limbah secara *on site* komunal pada lingkungan permukiman yang padat.
4. Belum adanya pembangunan sarana pengelolaan air limbah dalam skala komunitas (kelompok masyarakat) melalui pendekatan masyarakat.

Pembangunan Saluran Drainase

1. Belum optimalnya saluran / drainase untuk mengatasi bencana banjir baik di perkotaan maupun di pedesaan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara saluran drainase yang ada.
3. Kondisi saluran drainase baik kuantitas maupun kualitas belum sesuai atau tidak sebanding dengan cakupan dan kondisi wilayah.
4. Belum optimalnya keterpaduan perencanaan pembangunan saluran drainase kota dengan perencanaan penataan ruang kota.
5. Persebaran saluran drainase yang masih terbatas .

Perkotaan dan Pedesaan

1. Belum terwujudnya pembangunan jalan poros desa yang merupakan sarana vital dalam pengembangan produksi daerah pedesaan.
2. Penataan pembangunan lingkungan pemukiman yang **kumuh** penduduk belum sesuai harapan.
3. Kurang terpadunya sistem perekonomian antara wilayah pedesaan dan perkotaan.

c. Perumahan Rakyat

1. Masih adanya kualitas rumah yang kurang layak huni, dikarenakan sebagian besar wilayah Kabupaten Sragen merupakan wilayah pedesaan yang didominasi karakter masyarakat yang bermata pencaharian di bidang pertanian dan buruh.
2. Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas pemukiman, hal ini dilihat dari belum adanya kegiatan peningkatan kualitas pemukiman yang ada dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Sragen.
3. Belum optimalnya penataan lingkungan pemukiman, dikarenakan masih belum terlibatnya masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman dan belum dilakukannya pengelolaan data base tentang bangunan gedung yang ada baik sebagai hunian ataupun fungsi lainnya.
4. Masih kurangnya pembinaan teknis tentang bangunan dan gedung, dikarenakan terbatasnya SDM pelaksana yang ada.

5. Belum adanya norma, standar, pedoman dan manual dalam pencegahan bahaya kebakaran gedung.
6. Masih banyak rumah yang belum menikmati listrik dan fasilitas air bersih dari PLN dan PDAM.
7. Belum terfasilitasinya warga miskin untuk memiliki rumah yang sehat dan layak huni.
8. Belum seimbang nya pertumbuhan rumah tangga dengan pertumbuhan pengadaan rumah yang sehat dan berwawasan lingkungan.
9. Kurang adanya dorongan dari pemerintah kepada investor bidang perumahan untuk menyediakan rumah bagi masyarakat.

d. Penataan Ruang

1. Belum sinergisnya rencana tata ruang dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dan belum tersusunnya rencana tata ruang wilayah pada masing – masing kecamatan.
2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, dan belum optimalnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

e. Perencanaan Pembangunan

1. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya perkembangan wilayah kecamatan yang bersifat strategis dan wilayah cepat tumbuh.
3. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan wilayah perkotaan.
4. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi .
5. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral, spasial dan instansional.

6. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya.
7. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundangan yang baru.
8. Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana .
9. Belum optimalnya kerjasama yang bersifat sinergis antara pemerintah kabupaten, baik dengan pemerintah daerah, kalangan dunia usaha dalam rangka pemerataan pengembangan wilayah .
10. Masih terdapat kesenjangan perkembangan dan pertumbuhan desa – desa di wilayah perbatasan, terutama prasarana dan sarana dasar serta pelayanan publik.
11. Masih rendahnya kapasitas / kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan data yang belum optimal, belum optimalnya penelitian dan pengembangan serta belum tersedianya Standar Operating Sistem perencanaan.

f. Perhubungan

1. Belum meratanya pengelolaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan darat.
2. Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan darat.
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan darat. Hal ini ditandai belum terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi penumpang.
4. Masih kurangnya fasilitas pengamanan lalu lintas dan keterpaduan sistem jaringan jalan.
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji kelayakan jalan kendaraan bermotor.
6. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
7. Masih rendahnya kualitas manajemen dan rekayasa disebabkan kondisi jalan yang belum memadai.

g. Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya kuantitas sampah domestik terutama sampah plastik, tidak sebanding dengan kapasitas daya tampung sarana pengelolaan dan pengolahan sampah.
2. Meningkatnya pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup terutama di wilayah perkotaan disebabkan aktivitas industri, pertambangan dan transportasi, rumah tangga (domestik).
3. Menurunnya kuantitas sumber daya air diakibatkan kerusakan daerah resapan / tangkapan air.
4. Masih tingginya luasan lahan kritis dan rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.
5. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Meningkatnya bahan polutan yang berpotensi mencemari lingkungan akibat penambahan jumlah kendaraan dan aktivitas industri.
7. Meningkatnya pencemaran tanah akibat penggunaan bahan kimia pada kegiatan pertanian.
8. Meningkatnya intensitas pemanasan global.
9. Terbatasnya luas ruang terbuka hijau terutama di wilayah padat kendaraan bermotor dan padat pemukiman.
10. Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat dan instansi pemerintah.

h. Pertanahan

1. Belum terwujudnya pembangunan sistem informasi pendaftaran tanah. Hal ini dikarenakan belum berfungsinya sistem informasi pendaftaran tanah sebagai basis data untuk pengambilan kebijakan pembangunan di bidang pertanahan.
2. Belum terwujudnya penataan penguasaan dan kepemilikan serta pemanfaatan tanah yang disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan pertanahan, masih banyaknya bidang – bidang tanah yang belum didaftarkan / disertifikatkan.
3. Masih dijumpainya konflik – konflik sengketa tanah.

i. Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Sistem pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil (SIAK) belum optimal sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Hal ini dapat dilihat masih dijumpainya inkonsistensi data kependudukan baik yang dikeluarkan oleh BPS maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Kerjasama dan koordinasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil belum berjalan sesuai harapan.
3. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil belum sepenuhnya terwujud sesuai harapan masyarakat. Masih dijumpai penyelesaian administrasi kependudukan dan catatan sipil tidak sesuai dengan target yang ditetapkan baik waktu maupun biaya pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
4. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia khususnya bidang teknologi informasi, dan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
5. Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban terhadap tertib administrasi kependudukan masih rendah, sehingga mempengaruhi validitas data base kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kepemilikan KTP, akte kelahiran, dan dokumen kependudukan / catatan sipil lainnya.

j. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan mengenai peningkatan kualitas anak dan perempuan. Hal ini ditandai rendahnya presentase perempuan dalam jabatan publik.
2. Masih kurang optimalnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik Focal Point maupun pelayanan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun tempat – tempat umum. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi antara lain penelantaran anak, anak berhadapan dengan hukum serta anak jalanan.

4. Masih tingginya kesenjangan antara laki – laki dan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, terutama kesenjangan perempuan dan laki – laki dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan perbedaan upah. .
5. Masih perlu ditingkatnya pemenuhan hak-hak anak yang terkait dengan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.

k. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana.
2. Masih kurangnya partisipasi laki – laki dalam kesertaan program KB. Hal ini ditandai masih rendahnya presentase pengguna alat kontrasepsi MOP dan Kondom.
3. Masih kurangnya tenaga penyuluh KB (PLKB) dan sarana prasarana pelayanan KB. Rasio jumlah PLKB dengan desa yang dilayani baru mencapai 5 – 6.
4. Masih tingginya presentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.

l. Sosial

1. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan social, terutama keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, lanjut usia terlantar, anak terlantar, penyandang cacat dan wanita rawan social ekonomi.
2. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social, sehingga belum tertanganinya dengan baik permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Masih tingginya jumlah penduduk miskin disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar tim dalam program penanggulangan kemiskinan.
4. Tingginya kerentanan eks Penyandang Penyakit Sosial untuk kembali pada perilaku yang kurang baik.
5. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi social masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan social.
6. Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha (*Corporate Social Responsibility / CSR*).

m. Ketenagakerjaan

1. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini terlihat dari tingkat ketrampilan tenaga kerja yang minim dan pendidikan tenaga kerja yang masih rendah, rata – rata SMA ke bawah.
2. Rendahnya peluang kesempatan kerja. Hal ini ditandai tidak sebandingnya jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.
3. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja dalam system hubungan industrial dan syarat – syarat kerja. Hal ini ditandai masih banyaknya kasus – kasus hubungan industrial yang terjadi.
4. Kurangnya informasi peluang kesempatan kerja bagi para pencari kerja.

n. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

1. Masih adanya usaha mikro, kecil dan menengah yang belum berbadan hukum, sehingga menghambat pengembangan usaha.
2. Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM. Hal ini disebabkan keberadaan lembaga pengembangan usaha dan lembaga diklat belum memadai, dan belum terbangunnya kemitraan usaha dengan perusahaan besar.
3. Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana pemasaran dan informasi pasar.
4. Masih rendahnya kapasitas para pengelola Koperasi dan UMKM. Hal ini ditandai sebagian besar SDM Koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen seadanya.

o. Penanaman Modal

1. Belum optimalnya promosi dan kerjasama antar instansi dalam rangka menarik investasi dalam negeri maupun luar negeri.
2. Belum optimalnya pelayanan perijinan usaha, dukungan regulasi dan kepastian hukum serta sarana prasarana pendukung investasi daerah, diantaranya jaringan jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, perbankan, dll.

p. Kebudayaan

1. Masih rendahnya pelestarian dan aktualisasi adat dan nilai – nilai budaya daerah. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya pengaruh budaya luar negeri.
2. Belum optimalnya upaya pelestarian benda purbakala dan peninggalan sejarah sebagai asset budaya daerah.
3. Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan budaya daerah untuk mengangkat citra budaya daerah. Hal ini disebabkan masih kurangnya apresiasi karya seni budaya daerah.
4. Belum kuatnya kerjasama dan jalinan kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah.

q. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap budaya narkoba dan pergaulan bebas. Hal ini disebabkan pengaruh budaya luar dan teknologi informasi yang sangat pesat.
2. Belum optimalnya peran pemuda dalam kegiatan pembangunan. Hal ini disebabkan kapasitas pemuda belum sesuai harapan, sehingga keterlibatan pemuda dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan masih rendah, serta akses pemuda dalam setiap tahapan pembangunan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan atau belum sepenuhnya dilibatkan.
3. Belum optimalnya upaya menumbuhkan kewirausahaan di kalangan pemuda. Hal ini dikarenakan kapasitas dan jiwa kewirausahaan dikalangan generasi muda masih rendah dan kegiatan – kegiatan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh generasi muda belum berkembang sesuai harapan.
4. Belum optimalnya prestasi dan pemasyarakatan olah raga. Hal ini dikarenakan kegiatan kejuaraan untuk menggali bibit – bibit atlet berprestasi masih kurang / rendah, dan upaya untuk mensosialisasikan gerakan pemasyarakatan olah raga belum berjalan secara berkelanjutan.
5. Masih terbatasnya sarana prasarana olah raga. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah cabang olah raga dengan fasilitas tidak

seimbang, dan jumlah cabang olahraga cukup besar sedangkan sarana dan prasarana masih terbatas.

r. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran politik bagi warga Negara. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya angka golput dalam beberapa pelaksanaan pemilu.
2. Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa dalam masyarakat, ditandai oleh kurangnya pemahaman dasar Negara, nasionalisme, hak dan kewajiban warga Negara, kesadaran hukum dan penghargaan hak asasi manusia.
3. Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan, jati diri bangsa dan nasionalisme.
4. Masih adanya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, antara lain disebabkan oleh kurangnya aparat kepolisian dan jumlah anggota Linmas yang terlatih di masing – masing desa dan kelurahan.
5. Belum optimalnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum, penanggulangan penyakit masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat.
6. Belum optimalnya fungsi perlindungan masyarakat (Linmas) dalam melaksanakan penanganan awal gangguan kamtibmas, penyakit masyarakat (pekat) dan tanggap bencana.
7. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana.

s. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Belum optimalnya fungsi DPRD meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.
2. Belum optimalnya pelayanan kedinasan kepala daerah dan kepala daerah dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

3. Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah, baik pajak, retribusi daerah, pinjaman daerah sejalan dengan peraturan perundangan yang baru, yang dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
4. Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengawasan internal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan masih kurangnya kapasitas tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan.
5. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana teknologi informasi di SKPD dan pemerintah desa / kelurahan yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.
6. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan kerjasama dalam daerah dalam rangka peningkatan penanaman modal, pelayanan public, dan pengelolaan sumber daya alam.
7. Belum tersusunnya peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan merespon perkembangan peraturan perundang – undangan yang baru, dan masih ditemuinya beberapa peraturan yang belum sinergis.
8. Belum optimalnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan public yang responsive dan akuntabel. Hal ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya fasilitas dan kelengkapan peralatan kerja dan masih terbatas SDM aparat yang berkualitas.

t. Ketahanan Pangan

1. Pertambahan penduduk yang semakin meningkat membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pangan yang semakin meningkat pula.
2. Masih tingginya ketergantungan pada beras menyebabkan tekanan terhadap peningkatan produksi beras semakin tinggi pula.
3. Masih adanya kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
4. Belum adanya data base potensi produk pangan.
5. Masih banyaknya angka kemiskinan yang berpotensi terjadinya kerawanan pangan.

6. Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan bergizi seimbang.
7. Belum optimalnya produktifitas dan mutu produk pangan.

u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Lemahnya kapasitas masyarakat desa / kelurahan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya produktif dalam pengembangan usaha ekonomi produktif relative sedikit dan belum mampu mengelola dan mengembangkan usaha secara baik.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat desa / kelurahan dalam mendukung pembangunan di pedesaan.
3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan system informasi masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa / kelurahan.
4. Masih rendahnya peran perempuan pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil – hasil pembangunan masih rendah. Hal ini disebabkan peran elit – elit desa masih dominan dan akses perempuan dalam setiap tahapan pembangunan belum sesuai harapan.
5. Kurangnya diversifikasi produk pangan di tingkat hulu.

v. Statistik

1. Belum terwujudnya sinkronisasi data untuk keperluan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Hal ini dapat diketahui masih dijumpainya perbedaan data dari beberapa sumber data, baik dari BPS maupun dari instansi terkait.
2. Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat dan akurat. Hal ini menjadi kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen lainnya.

w. Kearsipan

1. Belum terbangunnya Sistem Administrasi Kearsipan yang informative dan handal, disebabkan belum adanya data base dan jaringan informasi kearsipan.
2. Belum optimalnya upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah, disebabkan terbatasnya SDM pengelola kearsipan dan kapasitas SDM yang masih kurang untuk melakukan pendataan dan pengolahan dokumen arsip.
3. Kurang optimalnya pemeliharaan terhadap dokumen / arsip daerah dan sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip daerah.

x. Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi, informasi dan media massa bagi masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya pembinaan terhadap lembaga komunikasi masyarakat.
2. Belum terbangunnya system informasi manajemen pemerintah daerah untuk penyebaran informasi pembangunan daerah. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, serta pengelolaan data dan informasi yang belum optimal.
3. Kurang memadainya kualitas SDM di bidang komunikasi dan informatika karena minimnya ketrampilan dan keahlian dalam hal penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.
4. Kurang optimalnya penyebarluasan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan masih lemahnya system informasi manajemen dan belum adanya jalinan kerjasama dengan media massa.

y. Perpustakaan

1. Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat, dan terbatasnya jumlah buku koleksi perpustakaan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan, disebabkan kurang memadainya sarana prasarana perpustakaan dan minimnya tenaga pengelola perpustakaan.

3. Belum terjangkaunya layanan perpustakaan di wilayah – wilayah tertentu, disebabkan oleh terbatasnya jumlah armada perpustakaan keliling dan perpustakaan masyarakat.

4.1.2. Pelayanan Urusan Kewenangan Pilihan

a. Pertanian

1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani.
2. Iklim ekstrim menyebabkan curah hujan yang tinggi dengan potensi banjir dan musim kemarau yang panas dan berkepanjangan menyebabkan bencana kekeringan.
3. Harga produk yang jatuh pada saat panen raya..
4. Isu globalisasi ekonomi menyebabkan masuknya produk-produk impor khususnya buah-buahan dan sayur mayur dari luar negeri beredar sampai pelosok tanah air dengan harga yang murah dan kualitas lebih baik.
5. Lemahnya permodalan usaha pertanian serta masih tingginya bunga bank untuk usaha tani dan bidang pertanian oleh perbankan dianggap memiliki resiko gagal yang tinggi.
6. Tidak stabilnya stok pupuk, obat serta tingginya harga saprodi pertanian.
7. Lemahnya jiwa kewirausahaan dan rendahnya permodalan petani menyebabkan petani hanya menjual hasil produk langsung dari lahan pertanian, menyebabkan petani tidak menikmati nilai tambah produknya sendiri.
8. Belum optimalnya pembinaan kepada petani peternak beserta dukungan dana insentif dalam mengembangkan usaha peternakannya.
9. Masih rendahnya pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
10. Masih rendahnya produksi hasil ternak, ditandai dengan fluktuatifnya hasil produksi peternakan.
11. Masih belum optimalnya pemasaran hasil produksi peternakan.
12. Belum adanya laboratorium kesehatan hewan untuk mengatasi penyebaran penyakit hewan.

13. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak terutama pada musim kemarau.
14. Masih banyak penyakit ternak terutama jenis hewan ternak besar dan unggas.
15. Adanya import sapi dengan dalih mencukupi kebutuhan daging dalam negeri.
16. Belum optimalnya pengelolaan hasil – hasil produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan.
17. Belum optimalnya pelayanan inseminasi buatan pada sapi ternak potong dan kambing, pos kesehatan hewan, rumah potong hewan dalam pelayanan publik.
18. Belum optimalnya kualitas bibit ternak, terutama induk betina.
19. Belum optimalnya pengendalian pangan yang berasal dari ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

b. Kehutanan

1. Belum optimalnya peran penyuluh kehutanan dan masyarakat sekitar hutan dalam pelestarian sumber daya hutan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa di sekitar hutan.
3. Masih ditemuinya perusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa di sekitar hutan. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat hutan dan dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha melaksanakan ijin tebang dan ijin angkut hasil hutan yang belum direhabilitasi, disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan rakyat>hal ini yang perlu dilakukan pengkayaan tanaman.
5. Belum optimalnya pelayanan data dan informasi kehutanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan belum adanya pemetaan secara digital kehutanan dan belum terbangunnya kesinambungan statistik kehutanan.
6. Masih adanya lahan kritis, disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan rakyat. Pengembangan hutan rakyat selama ini hanya berasal dari program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHHL).

7. Belum sinergisnya regulasi mengenai industri hasil hutan, sehingga rentan terhadap pelanggaran dalam pengelolaan industri hasil hutan.
8. Rendahnya infrastruktur pada kawasan sekitar hutan.

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Kurang optimalnya pengelolaan sumber daya mineral terkait pertambangan, dan belum tersedianya data potensi pertambangan yang akurat guna mendukung pemanfaatan potensi secara bijak.
2. Masih terdapat pengelolaan usaha pertambangan yang bersifat eksploitatif (PETI) Pertambangan Tanpa Ijin dan merusak kelestarian lingkungan dan sumber mata air alami. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi di bidang pertambangan.
3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan minyak dan gas.
4. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang energy sumber daya dan mineral khususnya pertambangan.
5. Masih terdapat sejumlah dusun dan rumah tangga yang belum terlayani listrik, terutama di wilayah pedesaan dan wilayah terpencil dan masih kurangnya pemanfaatan potensi energy alternative atau energy baru terbarukan.
6. Belum akuratnya data potensi geologi dan belum adanya data mitigasi bencana geologi, sarana prasarana dan pengawasan mitigasi bencana geologi.
7. Belum optimalnya pengelolaan potensi mineral (tambang dan migas) oleh masyarakat Sragen dan pemerintah Kabupaten Sragen.
8. Belum dilibatkannya secara penuh peran pemerintah Kabupaten Sragen dalam pengelolaan migas.

d. Pariwisata

1. Masih rendahnya jumlah kunjungan wisata dan pendapatan daerah dari obyek wisata.
2. Masih rendahnya daya saing destinasi pariwisata dibandingkan destinasi wisata sejenis di kabupaten lain. Hal ini ditandai masih banyaknya obyek

wisata daerah yang belum dilengkapi dengan daya tarik wisata dan sarana prasarana yang memadai.

3. Belum kuatnya jalinan kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

e. Perikanan

1. Masih terbatasnya kapasitas produksi perikanan budidaya dan benih ikan. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana, ketersediaan air, belum beragamnya jenis komoditas perikanan yang dibudidayakan dan tingginya ketergantungan pada pakan ikan buatan pabrik.
2. Masih rendahnya produksi perikanan tangkap di perairan umum disebabkan masih keterbatasan alat penangkapan ikan.
3. Keterbatasan sumber daya air dalam pembudidayaan ikan air tawar
4. Penerapan peraturan yang melindungi benih ikan berkualitas baik, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

f. Perdagangan

1. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar, dan produk makanan yang telah kadaluwarsa.
2. Masih terbatasnya volume dan nilai realisasi ekspor. Hal ini disebabkan lemahnya daya saing produk dalam hal mutu, desain dan merk dagang produk lokal, dan belum kuatnya jaringan eksportir.
3. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau di seluruh wilayah, dan belum terintegrasinya pasar lokal.
4. Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan jalan raya. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dan kurang tertatanya kawasan perdagangan kaki lima.
5. Munculnya masalah sosial sebagai akibat dari banyaknya pasar swalayan / pasar modern.

6. Tingginya biaya ekonomi sebagai akibat dari masih rendahnya infrastruktur penunjang yang telah menyebabkan turunnya daya saing produk.
7. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan.
8. Berlakunya ACFTA 2010 yang mempengaruhi persaingan produk – produk perdagangan antar wilayah.

g. Industri

1. Masih rendahnya kapasitas iptek sistem produksi yang ditandai belum berkembangnya inovasi sistem produksi sehingga belum mampu mengoptimalkan kualitas produk industri.
2. Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum memiliki ijin usaha dan terbatasnya akses industri kecil dan menengah terhadap permodalan. Hal ini menyebabkan banyak industri kecil dan menengah yang kurang berkembang.
3. Masih rendahnya daya saing produk industri dibandingkan produk luar negeri dan daerah lain. Hal ini disebabkan kemampuan teknologi industri masih rendah dan belum adanya standarisasi mutu produk industri.
4. Belum optimalnya industri yang dapat menunjang pemasaran produk industri kecil dan menengah.
5. Kurang berkembangnya sentra – sentra industri daerah. Hal ini disebabkan akses transportasi yang belum memadai dan belum tertatanya informasi sentra industri.
6. Terbatasnya bahan baku industri.
7. Rendahnya kualitas SDM.

h. Ketransmigrasian

1. Masih rendahnya pemberangkatan transmigran dari Kabupaten Sragen ke lokasi penempatan transmigrasi, terutama di luar Jawa
2. Semakin menurunnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi ke luar pulau Jawa.

4.2 Isu-isu Strategis Pembangunan ditingkat nasional dan provinsi

4.2.1 Kondisi Lingkungan Nasional

Agenda peningkatan kesejahteraan rakyat tetap menjadi Prioritas dari pemerintah mendatang. Wujud terakhir dari perbaikan kesejahteraan akan tercermin pada peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Untuk menuju ke arah perbaikan kesejahteraan rakyat ditemukan beberapa kendala. Ada beberapa kondisi lingkungan nasional yang dapat terkait dengan Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

1. Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

Beberapa penyebab tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia ialah karena kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan kesempatan kerja bagi rakyat miskin sangat kecil. Hal tersebut dapat kita lihat terutama di daerah pedesaan, banyak sekali rakyat miskin yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.

Sementara itu angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini sangat ironis dimana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, selain itu, dalam hal pertanian dan juga kelautan Indonesia termasuk negara yang kaya akan hasil sumber daya tersebut.

Dari lain pihak merosotnya pengangguran di Indonesia disebabkan pula dengan banyaknya pihak swasta yang mengirimkan barang ke luar negeri seperti, beras, tekstil, bahkan gas, dll. Itu mengurangi tingkat para pekerja, yang seharusnya mereka layak mendapatkan pekerjaan karena itu merupakan produk lokal.

Tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh pemerintah baik pemerintah

pusat maupun pemerintah kabupaten/kota dan daerah Provinsi, termasuk pemerintah Kabupaten Sragen.

2.Terjadinya Krisis Energi Nasional

Munculnya kelangkaan serta tiadanya jaminan ketersediaan pasokan minyak dan gas (migas) di negeri sendiri merupakan kenyataan paradoks dari sebuah negeri yang kaya sumber energi. Hal ini antara lain disebabkan tingginya ketimpangan antara produksi dan konsumsi energi nasional.

Berdasarkan laporan Kementerian ESDM tahun 2009 rata-rata produksi minyak bumi dan kondesat sebesar 963.269 barel per hari (bph). Sedangkan laporan BP Migas produksi minyak secara nasional pada tahun 2010 hanya naik pada kisaran 965.000 bph. Artinya terdapat angka kenaikan hanya 1.731 bph. Sementara kebutuhan konsumsi energi nasional sekitar 1.400.000 bph. Artinya terdapat selisih cukup tajam antara tingkat produksi yang ideal dengan kebutuhan. Selain itu pesatnya pembangunan di bidang teknologi, industri, dan informasi memicu peningkatan kebutuhan masyarakat akan energi.

3.Tuntutan Perwujudan *Good and Clean Governance* yang Semakin kuat

Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, masih berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari solusi lima tahun ke depan. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi juga akan kuat berpengaruh terhadap pencarian

alternatif-alternatif kebijakan dalam bidang aparatur negara. Untuk itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan rakyat.

4. Penurunan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Frekuensi serta Intensitas Bencana Alam

Meningkatnya frekuensi kejadian berbagai jenis bencana alam dengan skala dan intensitasnya mengharuskan pemerintah menyusun rencana aksi yang sistematis dan kongkrit mulai dari pra bencana, pada saat tanggap darurat dan pada pasca terjadinya bencana (rehabilitasi-rekonstruksi). Hal ini disebabkan setiap bencana menimbulkan permasalahan kemanusiaan yang serius serta dampak sosial bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi. Bencana yang umumnya terjadi dalam waktu singkat menghancurkan hasil pembangunan yang telah dirintis dan diperjuangkan dalam waktu yang lama. Selain menimbulkan korban jiwa, bencana menghancurkan perumahan, area pertanian dan perkebunan, infrastruktur perekonomian, infrastruktur publik, komunikasi dan transportasi, instalasi pengadaan air dan energi, serta bidang-bidang penting dan strategis lainnya. Bencana meluluhlantahkan seluruh aspek kehidupan manusia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak hanya pemerintah namun dialami pula oleh hampir semua Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah, mengalami permasalahan terbatasnya sumber dana pembangunan dibandingkan dengan kebutuhan yang demikian besar untuk memecahkan permasalahan yang dirasakan oleh daerah-daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil, sehingga proporsi belanja daerah didominasi oleh pengeluaran untuk belanja pegawai dan belanja tidak langsung. Dengan demikian alokasi belanja

langsung sangat kecil. Untuk itu partisipasi *stakeholder* warga negara sangat dibutuhkan.

5. Ancaman Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Masyarakat

Disamping gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan yang bersifat konvensional dan yang menyangkut kekayaan negara, seperti keuangan negara (korupsi), dan hasil hutan (*illegal logging*) kita harus menghadapi kejahatan lintas negara (*transnational crimes*). Lebih dari itu bangsa kita juga mengalami keamanan yang cukup mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam bentuk peledakan bom (terror), kerusuhan massa, konflik sosial dan gerakan separatis/pemberontakan bersenjata.

Menghadapi kondisi tersebut, pembangunan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi ancaman stabilitas serta tuntutan perubahan dan dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Tantangan lainnya yang dihadapi, adalah mengurangi meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, sehingga penanaman wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara perlu lebih ditingkatkan, serta dipahami oleh seluruh komponen masyarakat secara lebih efektif dengan tetap berada dalam rambu hukum.

6. Penanggulangan Bahaya Narkoba

Kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba. Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, apalagi para pelakunya sebagian besar adalah generasi mudah yang diharapkan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa depan. Secara yuridis, instrumen hukum

yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi, sebenarnya sudah jauh dari cukup sebagian dasar pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Tetapi dalam praktek penegakan hukumnya masih terkesan tidak sungguh-sungguh, karena seringkali pelaku hanya dihukum ringan.

Mengingat peredaran narkoba sekarang ini sudah begitu merebak, maka baik pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama berusaha dalam menanggulangi bahaya narkoba.

7.Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

KKN telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan menambah kesengsaraan rakyat Indonesia. Sejak berlangsungnya era reformasi, upaya pemberantasan KKN berlangsung semakin gencar. Langkah ini sudah menjadi komitmen seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah sendiri juga telah menegaskan komitmennya dalam rangka memberantas korupsi melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi ironisnya walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktek-praktek korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya. Untuk mencegah dan menanggulangi korupsi maka dibutuhkan suatu komitmen dari seluruh strata dalam struktur organisasi, dimulai dari pimpinan tertinggi, pimpinan menengah, pimpinan terendah sampai staf atau pegawai bawahan untuk tidak melakukan tindakan tidak terpuji yaitu KKN.

8. Penurunan Hambatan Perdagangan Antar Daerah

Salah satu pemikiran dalam konsep free trade menempatkan kekuatan mekanisme pasar untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara optimal. Meskipun menimbulkan banyak polemik, akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang meyakini keunggulan mekanisme pasar bebas dapat memajukan dan membangun suatu area/kawasan melalui bentuk kesepakatan-kesepakatan regional.

Untuk mengantisipasi adanya perdagangan bebas ini, pemerintah terus berupaya menahan laju pengaruh globalisasi dan menjaga daya saing produk Indonesia sehingga mampu bersaing dengan produk luar negeri, diawali dengan penghapusan hambatan dalam perdagangan, baik yang berasal dari intervensi pemerintah maupun perilaku persaingan yang tidak sehat dari pengusaha sendiri. Berbagai hambatan pokok perdagangan yang dihadapi para pelaku usaha antara lain kondisi infrastruktur Indonesia yang kurang memadai menciptakan high cost economy yang berimplikasi pada penurunan daya saing produk, banyaknya pungutan yang membebani aktivitas perdagangan pengusaha, dan bahaya kesulitan untuk memperoleh perijinan akan menyebabkan kendala dalam perdagangan.

9. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Kenyataannya dalam beberapa aspek pembangunan, perempuan kurang dapat berperan aktif. Hal ini disebabkan karena kondisi dan posisi yang kurang menguntungkan dibanding laki-laki. Seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya pembangunan, sistem upah yang merugikan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, sehingga manfaat pembangunan kurang diterima kaum perempuan.

Berbagai upaya pembangunan nasional yang selama ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik

perempuan maupun laki-laki ternyata belum dapat memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Bahkan belum cukup efektif memperkecil kesenjangan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan memperoleh manfaat secara optimal belum terpenuhi sehingga pembangunan nasional belum mencapai hasil yang optimal, karena masih belum memanfaatkan kapasitas sumber daya manusia secara penuh.

Faktor penyebab kesenjangan gender yaitu Tata nilai sosial budaya masyarakat, umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (ideology patriarki), Peraturan perundang-undangan masih berpihak pada salah satu jenis kelamin dan dengan kata lain belum mencerminkan kesetaraan gender, penafsiran ajaran agama yang kurang komprehensif atau cenderung tekstual kurang kontekstual, cenderung dipahami parsial kurang holistik; Kemampuan, kemauan dan kesiapan perempuan sendiri untuk merubah keadaan secara konsisten dan konsekwen, rendahnya pemahaman para pengambil keputusan di eksekutif, yudikatif, legislatif terhadap arti, tujuan, dan arah pembangunan yang responsif gender. Adanya kesenjangan pada kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan belum dapat menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Selain itu rendahnya kualitas perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi penerusnya, mengingat mereka mempunyai peran reproduksi yang sangat berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia masa depan.

Ada dua indikator untuk mengukur kesenjangan antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki. Dua indikator yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index/HDI*) yang merupakan indeks komposit dari komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi; dan *Gender-related Development Index* (GDI). Menurut HDR

2005, Indonesia berada pada peringkat HDI ke-110 dari 170 negara di dunia, dengan indeks sebesar 0,697, sedangkan untuk GDI menduduki peringkat ke-87 dari 140 negara di dunia, dengan indeks sebesar 0,691. Perbedaan angka HDI dan GDI merupakan indikasi adanya kesenjangan gender.

Ukuran lain yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah *Gender Empowerment Measurement* (GEM). Angka indeks ini dihitung dari partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Angka GEM Indonesia pada tahun 2005 kurang lebih 0,458, yang berarti peran perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan kurang dari separuh dari peran laki-laki. Di bidang politik, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, namun hasil Pemilu 2004 masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Menurut Komisi Pemilihan Umum (2005) keterwakilan perempuan di DPR adalah 11,6 persen dan di DPD sebesar 19,8 persen. Sementara itu, rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan publik juga dapat dilihat dari persebaran perempuan PNS yang menjabat sebagai Eselon I, II, dan III, yaitu masing-masing 9,6 persen; 6,7 persen; 13,5 persen.

10. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Masih cukup banyak anak yang kurang gizi ataupun mengidap beberapa penyakit karena dampak lingkungan yang kurang sehat atau anak-anak yang tidak mampu mengakses layanan kesehatan dasar. Di Indonesia masih terdapat anak dengan status gizi buruk yang dijumpai di sejumlah daerah, anak terlantar korban KDRT maupun penurunan tingkat sosial ekonomi orang tua yang jumlahnya cukup signifikan, masih tinggi kasus kematian bayi dan balita, meningkatnya jumlah anak

nakal dan anak jalanan, banyaknya anak-anak yang terpaksa bekerja atau pekerja anak, jumlah anak yang memiliki akte kelahiran, serta meningkatnya jumlah anak yang dilacurkan dan korban trafficking dan lain sebagainya.

Maka dari itu pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan, Kesejahteraan Sosial Anak Termasuk dalam Skala Prioritas Pembangunan Nasional, yang Mengacu pada Agenda Gerakan Nasional Perlindungan Anak.

Tujuan peningkatan kesejahteraan sosial anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hajat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

4.2.2.Kondisi Lingkungan Regional Provinsi Jawa Tengah

Kondisi lingkungan regional yang dapat terkait dengan Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

1.Tingginya Jumlah Penduduk Miskin

Persoalan mendesak yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Tengah adalah tingginya jumlah penduduk miskin, yaitu sebesar 6.667.200 orang (17,72%) pada tahun 2010. Pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin, yaitu 16,56%. Dengan demikian, selama dua tahun jumlah penduduk miskin berkurang 1,16%.

2.Tingginya Jumlah Penganggur

Jumlah penganggur terbuka di Jawa Tengah relatif tinggi, yaitu sebesar 6,86% pada tahun 2010 ada sedikit penurunan bila dibandingkan jumlah penduduk miskin tahun 2009 sebesar 7,33%.; dan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ada 68,97% Jumlah

penganggur ini cenderung bertambah sejalan dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan dan terjadinya PHK akibat ancaman terjadinya krisis keuangan global.

3. Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian

Permasalahan yang masih terjadi di Jawa Tengah adalah tingginya angka alih fungsi lahan pertanian ke pertanian lebih kurang sebesar 2% per tahun. Akibat adanya alih fungsi lahan ini adalah berkurangnya total produksi pertanian yang berakibat lanjutan pada berkurangnya ketersediaan pangan.

4. Belum Meratanya Pelayanan Kesehatan Dasar

Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang diprogramkan oleh pemerintah (pusat) belum menjangkau seluruh keluarga miskin yang ada di Jawa Tengah. Sementara ada keterbatasan kemampuan anggaran daerah untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

5. Masih Rendahnya Realisasi Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu solusi bagi terjadinya pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi tingginya angka pengangguran. Perkembangan realisasi investasi untuk PMDN turun dari tahun 2010 sebesar 12,070,31 trilyun menjadi 9348,93 Milyar rupiah tahun 2009 untuk PMDN, dan untuk PMA turun realisasi investasi dari 385,79 Milyar rupiah menjadi 10686,63 Milyar rupiah tahun 2010. Sementara itu dari persetujuan hingga ke realisasi investasi tahun 2009 menunjukkan peningkatan, yaitu dari persetujuan sebesar 83,82 trilyun rupiah menjadi 95,079.31 trilyun rupiah. Namun tahun 2010 mengalami penurunan, yaitu dari persetujuan 1,19 trilyun rupiah yang terealisasi hanya 348,93 milyar rupiah untuk PMDN, dan untuk PMA pada tahun 2009 terjadi penurunan persetujuan investasi dari 385,79 milyar

rupiah menjadi 142,39 milyar rupiah, dan tahun 2010 turun dari 317,17 milyar rupiah menjadi 106,63

6. Masih Rendahnya Akses Usaha Kecil dan Mikro Terhadap Permodalan Usaha dan Pasar Ekspor

UMKM adalah basis perekonomian yang cukup tangguh di Jawa Tengah. Kontribusi UMKM bagi penyerapan tenaga kerja selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup tajam, hampir mencapai 40,59 %. Sementara itu, jumlah aset UMKM sebesar 4.192 trilyun rupiah pada tahun 2005 menjadi 6.106 trilyun rupiah pada tahun 2010 atau meningkat sampai 45,65 %. Sayangnya prestasi ini tidak diimbangi dengan pelayanan permodalan yang diberikan oleh pemerintah. Beberapa UMKM khususnya yang ditangani perempuan pengusaha bahkan sulit memperoleh akses permodalan. Selain itu pasar ekspor juga sulit untuk ditembus karena selain kualitas produk yang akalah bersaing, juga akses menuju tempat tujuan ekspor belum sepenuhnya mudah terjangkau.

7. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Amanah (*Good Governance*)

Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* sudah menjadi salah satu isu penting di Indonesia sejak beberapa tahun lalu, didahului oleh krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang meluas menjadi krisis multidimensi. Krisis tersebut telah mendorong arus balik yang menuntut perbaikan atau reformasi dalam penyelenggaraan negara termasuk birokrasi pemerintahannya. Salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensi yang dialami tersebut adalah karena buruknya atau salah kelola dalam penyelenggaraan tata pemerintahan (*poor governance*), diindikasikan oleh beberapa hal, antara lain: (1) dominasi kekuasaan oleh satu pihak terhadap pihak-pihak lainnya, sehingga pengawaan menjadi sulit dilakukan; (2) terjadinya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); dan (3)

rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kepada publik atau masyarakat di berbagai bidang. Pihak-pihak lainnya, sehingga pengawasan menjadi sulit dilakukan; (2) terjadinya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); dan (3) rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kepada publik atau masyarakat di berbagai bidang. Pihak-pihak yang dituntut untuk melakukan reformasi tidak hanya negara saja (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) tetapi juga dunia usaha/swasta (*corporates*) dan masyarakat luas (*civil society*). Secara umum, tuntutan reformasi berupa penciptaan *good corporate governance* di sektor dunia usaha atau swasta, penciptaan *good public governance* dalam penyelenggaraan pemerintah negara, dan pembentukan *good civil society* atau masyarakat luas yang mampu mendukung terwujudnya *good governance*.

8. Seringnya terjadi bencana Alam

Berbagai macam bencana alam terjadi setiap tahun di Jawa Tengah, baik banjir, kekeringan, tanah longsor, bencana gunung berapi, kebakaran hutan terjadi di Jawa Tengah. Telah disusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana maka diharapkan pengurangan resiko bencana dapat diantisipasi sebelumnya (mitigasi) bencana.

9. Masalah Penegakan Hukum

Kesadaran hukum masyarakat masih rendah, demikian halnya penegakan hukum belum sebagaimana yang diharapkan. Beberapa kasus korupsi banyak yang belum ditindaklanjuti, bahkan kasus yang telah lama hingga tahun 2008 belum memperoleh penanganan yang serius. Jawa Tengah adalah barometer dalam hal ketenteraman dan keamanan yang kondusif, namun dalam hal penegakan hukum masih perlu ditingkatkan.

10. Belum Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

Dua indikator perwujudan keadilan dan kesetaraan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG Jawa Tengah sejak tahun 2008 hingga tahun 2009 meningkat sebesar 1 poin, yaitu dari 64,6 menjadi 65,03; sedangkan IDG tahun 2008 sebesar 59,8 meningkat menjadi 59,96 pada tahun 2010, atau naik sebesar 0,16. Meskipun demikian, peningkatan ini lebih rendah dibandingkan provinsi lain. Saat ini IDG Jawa Tengah menduduki ranking 11 dari 33 provinsi di Indonesia. Ketidakberhasilan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender juga dapat dilihat dari tingginya angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4.2.3 Isu –isu Strategis Pembangunan di tingkat Kabupaten Sragen

Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Namun demikian dalam pelaksanaan pembangunan daerah selalu muncul isu-isu strategis yang selalu muncul di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Berdasarkan registrasi, kenaikan jumlah penduduk selama 5 tahun mengalami kenaikan rata-rata 0,55 % per tahun. Pada akhir Tahun 2005 jumlah penduduk di Kabupaten Sragen mencapai 858.266 jiwa, sementara pada akhir Tahun 2010 mencapai 883.464 jiwa. Dengan demikian mengalami kenaikan 10,67 % atau sebesar 91.570 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk tahun 2010 sebesar 938 jiwa/km². Adapun jumlah KK miskin di Kabupaten Sragen terus mengalami penurunan drastis. Pada Tahun 2005 KK miskin masih sebanyak 53.998 KK atau sebesar 21,09 % dari total KK yang sebanyak 256.063 KK. Dengan beragam upaya pengentasan

kemiskinan selama 5 tahun ini maka pada Tahun 2008 jumlah penduduk miskin ada 20,83 %, tahun 2009 19,70% (167.300jiwa) dan tahun 2010 turun 2,21 % menjadi 17,49 %(149.700 Jiwa).

2.Kurangnya ketersediaan air bersih dan drainase

Sebagai penunjang hidup sehat, maka pemerintah Daerah berkomitmen untuk bisa menyiapkan sarana air bersih dan drainase yang layak, khususnya penyediaan air bersih perdesaan di daerah rawan kekeringan air bersih. Telah di bangun sarana air bersih di 821 lokasi yang dapat melayani sejumlah 461.539 Jiwa. Sedangkan untuk penyediaan air bersih perkotaan oleh PDAM, selama 5 tahun ini telah dibangun sumur produktif sebanyak 7 unit, jaringan pipa 34.965 m dan penambahan sambungan rumah sebanyak 3.425 sambungan rumah,sehingga sampai akhir tahun 2010 dapat terlayani sebanyak 36.035 sambungan rumah. Namun demikian kondisi yang ada untuk mencukupi kebutuhan penduduk di desa dan kota tentang air bersih yang berkualitas masih belum optimal.

3.Belum optimalnya peningkatan investasi dan tantangan perdagangan bebas.

Kebijakan di bidang investasi ini diarahkan pada penghapusan biaya tinggi antara lain dengan penyederhanaan prosedur perijinan penyempurnaan kelembagaan yang menangani investasi agar berdaya saing tinggi,efisien ,transparan dan non diskriminatif.

4 Terjadinya iklim ekstrim menyebabkan banjir dimusim hujan dan kekeringan di musim kemarau, meskipun pada tahun 2010 terjadi fenomena musim hujan sepanjang tahun.

5.Masih terbatasnya Peningkatan daya saing industri kecil.

Untuk itu ,Pengembangan Industri kecil di Kabupaten Sragen lima tahun kedepan arah kebijakannya, perlu diarahkan untuk:

1. Meningkatkan Utilitas kapasitas produk.
2. Memperkuat basis produksi.
3. Meningkatkan daya saing dengan tekanan pada industri kecil yang menyerap tenaga kerja lebih banyak (home industri).

6. Belum optimalnya peningkatan pengelolaan BUMN / UPTD. Oleh

Karena itu pengelolaan BUMD di Kabupaten Sragen lima tahun mendatang, arah kebijaksanaanya, diprioritaskan pada peningkatan kinerja dan daya saing BUMD / UPTD agar dapat memberikan kontribusi yang memadai terhadap perekonomian daerah

7. Belum optimalnya Perbaikan iklim ketenagakerjaan.

Kebijakan ini diarahkan dengan pengembangan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan penataan hubungan industrial yang mencerminkan azas keadilan, kejujuran dan keterbukaan dan kondusif bagi perluasan lapangan kerja terutama di kalangan *wong cilik*. Selama ini pemerintah telah melakukan kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja di semua kecamatan di Kabupaten Sragen. Selain itu dalam upaya menciptakan tenaga kerja siap pakai yang handal dan profesional telah didirikan **Techno Park Ganesha Sukowati**. Sedangkan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, Pemerintah Daerah telah melakukan pengendalian dan pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja, Penyelesaian PHI/PHK di perusahaan, pemeriksaan ketenagakerjaan di perusahaan, penerapan K3 di perusahaan serta pelatihan penanggulangan kebakaran.

8. Belum optimalnya Pengembangan produk unggulan dan andalan daerah.

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan pemasaran dan mutu produk-produk unggulan, andalan dan potensial. Produk-produk tersebut seperti : beras, garut, tebu dan batik serta kerajinan khas Sragen lainnya.

9. Sebagian Infrastruktur Perhubungan dan Transportasi banyak yang sudah rusak

Adapun capaian kinerja pada urusan ini dapat dilihat dari kondisi jalan di Kabupaten Sragen secara keseluruhan sepanjang 992,2 Km yang terdiri dari :

- a).Kondisi baik: pada tahun 2006 sepanjang 697,28 Km (70,28 %) tahun 2007 : 758,98 Km (76,50 %),tahun 2008 : 781,75 Km (78,79%), tahun 2009 : 820.82 Km (79,58 %) dan menjadi 827,97 Km (83,45 %) pada tahun 2010.
- b).Kondisi sedang : pada tahun 2006 sepanjang 193,02 Km(19,45%) tahun 2007 : 147,23 Km (14,84 %), tahun 2008 : 144,29 Km (15,54 %), tahun 2009 : 127,07 Km (142,53 %) dan menjadi 112,73 km (11,36 %) pada tahun 2010.
- c).Kondisi rusak : pada tahun 2006 sepanjang 101,90 Km (10,27%) tahun 2007 : 85,99 Km (8,66 %),tahun 2008 66,16 Km (6,67%),tahun 2009 : 44,31 Km (6,06 %) dan menjadi 51,58 Km (5,19 %) pada tahun 2010

10. Belum Optimalnya Penyelenggaraan *Clean goverment.* *dan Good Governance*

Semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa belum memperoleh hasil optimal. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan amanah perlu didukung oleh komitmen semua unsur pemerintahan. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparan dan akuntabel masih belum optimal. Masih banyak temuan yang terjadi pada saat pemeriksaan oleh inspektorat Kabupaten Sragen.

11. Rendahnya Pengelolaan SDA Beserta Hasilnya

Pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini dilakukan belum optimal. Antara lain masih tingginya jumlah Pertambangan Tanpa Ijin (PETI). Output dan nilai tambah produk pertambangan dan penggalian masih relatif dilihat dari proporsi sektor pertambangan dan penggalian terhadap total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000. Selain itu pengelolaan SDA belum memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, sehingga terjadi kerusakan lingkungan pada kawasan-kawasan pertambangan.

12.Peningkatan SDM aparatur yang profesional, berkarakter,bersih dan anti KKN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

13.Pengurangan alokasi pupuk bersubsidi oleh pemerintah, memunculkan kecenderungan peredaran pupuk alternatif baik padat maupun cair dengan kualitas dan kuantitas yang beragam.

14..Belum Optimalnya Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkupan hidup belum dilaksanakan secara optimal terbukti masih banyaknya kasus pencemaran lingkungan dan juga kasus perusakan lingkungan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Penambanan liar (Penambangan Tanpa Ijin) masih banyak dijumpai di Kabupaten Sragen yang cenderung merusak lingkungan. Begitu juga air di Bengawan Solo pencemarannya semakin tahun terus bertambah dan yang merasakan dampak negatifnya masyarakat Kabupaten Sragen utamanya warga yang tinggal disekitar Sungai Bengawan Solo.

Untuk lebih jelasnya perbandingan isu-isu pembangunan yang muncul di tingkat Pemerintah pusat,Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sragen dapat diikuti tabel berikut ini:

TABEL PERBANDINGAN ISU-ISU PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI JAWA TENGAH DAN KABUPATEN SRAGEN

NO	TINGKAT PUSAT	PROVINSI JATENG	KABUPATEN SRAGEN
1	Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran	Tingginya jumlah penduduk miskin	Tingginya angka kemiskinan .
2	Krisis energi nasional	Bencana alam,kekeringan dan kebaka-	Kesediaan air bersih dan drainase

		ran hutan.	serta kekeringan
3	Tuntutan perwaju dan good and clean governance semakin kuat	Belum optimalnya Good Governance.	-Belum optimalnya clean Government dan Good governance. -Peningkatan SDM yang bersih dari KKN
4	Peningkatan kualitas lingkungan dan intensitas bencana alam	Sering munculnya bencana alam di Jawa Tengah	Optimalisasi pelestarian alam dan masih rendahnya pengelolaan sumber daya alam
5	Ancaman stabilitas keamanan	Penegakan hukum masih perlu ditingkatkan, perlu ditingkatkan dipastikan	Pemerintah yang bersih, amanah perlu didukung semua unsur.
6	Banyaknya pungutan yang membebani pedagang pengusaha.	Rendahnya akses usaha kecil terhadap pasar ekspor.	Peningkatan pengelolaan BUMD/ UPTD
7	Pemberantasan KKN	Belum optimalnya Penyelenggaraan tata pemerintahan Yang baik&amanah	Belum terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
8	Penurunan hambatan Perdagangan antar	Tempat tujuan ekspor belum mudah terjangkau	Pengembangan produk unggulan dan andalan daerah belum optimal

	Daerah		
9	Keadilan dan kesetaraan gender	Belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender	Belum optimalnya kesetaraan jender
10	Kesejahteraan dan Perlindungan anak	Masih tingginya angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum optimalnya Pelaksanaan pemerintahan yang amanah dan bersih

Dari data-data tentang isu-isu pembangunan di tiga tingkat pemerintahan tampak adanya benang merah yaitu:

1. Adanya prioritas penurunan jumlah penduduk miskin
2. Perlunya membuka lapangan kerja
3. Perlunya kesepakatan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan amanah
4. Perlunya peningkatan investasi
5. Perlunya program untuk mengantisipasi adanya bencana alam
6. Peningkatan kehidupan dan kerukunan hidup beragama, etika moral, dan akhlak mulia masyarakat dalam menghadapi globalisasi.